

Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,

Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Telpon/Fax : (0331) 5102770

Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 231/PM.00.02/K.JI-07/08/2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **IMBAUAN**

24 Agustus 2024

Yth:

Ketua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Kabupaten Jember

di-Tempat

Sehubungan dengan akan dimulainya Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur, dan sebagai Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang demokratis dengan cara memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pengawas Pemilu dan jajarannya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilihan, bahwa Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota SeAceh, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud, maka Bawaslu Jember memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

17. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
19. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 076/HK.01.01/K.JI-07/8/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Serentak Tahun 2024.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Jember Mengimbau untuk:

1. Melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

a) Persyaratan Pencalonan Partai Politik :

- 1) Memperhatikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon (Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau selanjutnya disebut PKPU 8/2024.
- 2) Memperhatikan Kepengurusan Partai Politik yang terdapat sengketa kepengurusan.
- 3) Terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon yang telah didaftarkan serta menarik pengusulan atas Pasangan Calon (Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU 8/2024); dan
- 4) Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKPU 8/2024.

b) Persyaratan Calon

- 1) Tidak terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 PKPU 8/2024) di antaranya:
 - a. Calon yang diusulkan memiliki kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan batas minimal usia;
 - c. Calon yang diusulkan merupakan mantan terpidana bandar narkoba dan/atau terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - d. Calon yang berstatus penyelenggara pemilu tidak mengundurkan diri paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - e. Calon yang diusulkan merupakan calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD namun belum mengundurkan diri;
 - f. Calon yang diusulkan sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. Calon yang diusulkan berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;
 - h. Calon yang diusulkan sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - i. Calon yang diusulkan merupakan mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang.
- 2) Memperhatikan Pertimbangan Hukum [3.16.3] putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024) bahwa syarat usia calon yang diusulkan memenuhi syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada saat pendaftaran Calon;
- 3) Calon yang diusulkan merupakan kepala daerah tapi mencalonkan diri di

wilayah lain, tapi tidak mengundurkan diri;

- 4) Calon yang diusulkan yang merupakan Gubernur, Bupati, atau Walikota mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Wali kota;
- 5) Calon yang diusulkan merupakan Penjabat yang belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentiannya; dan
- 6) Calon yang diusulkan merupakan anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa tapi belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentian.

c) Dokumen Persyaratan Calon

- 1) Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 20 s.d Pasal 33 PKPU 8/2024; dan
- 2) Ijazah yang disampaikan sebagai dokumen persyaratan calon diduga tidak benar/tidak sah (Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 8/2024);

d) Pendaftaran Calon

- 1) Bahwa KPU Jember mengumumkan pengajuan Pasangan Calon melalui media massa dan/atau laman KPU Jember (Pasal 95 ayat 3 PKPU 8/2024);
- 2) KPU Jember dalam mengumumkan pengajuan Pasangan Calon memuat:
 - a. Keputusan KPU Jember mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah;
 - b. Keputusan KPU Jember mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran; dan
 - c. Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon (Pasal 95 ayat 2 PKPU No. 8/2024);
- 3) Pendaftaran Pasangan Calon melewati batas akhir waktu pengajuan pada Hari terakhir yang ditetapkan KPU (Pasal 96 Pasal 95 ayat 3 PKPU No. 8/2024);
- 4) KPU Jember memeriksa dokumen persyaratan sesuai sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam PKPU 8/2024;
- 5) KPU Jember mendirikan helpdesk di Kantor KPU Jember guna memberikan informasi kepada calon terkait proses tahapan Pencalonan;
- 6) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan jadwal dan tempat yang tercantum dalam surat pengantar pemeriksaan Kesehatan (Pasal 110 dan 111 PKPU No. 8/2024); dan
- 7) Calon tidak lolos pemeriksaan kesehatan sehingga berdampak pada proses pencalonan Pasangan Calon.

e) Keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon

- 1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) PKPU 8/2024, KPU Jember melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
- 2) KPU Jember menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU 8/2024.

f) Pemeriksaan Kesehatan

1. Bahwa Peserta Pemilihan adalah Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf f “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim”
 2. Sehubungan dengan mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh dengan mencakup pada pemeriksaan termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkoba;
 - b. kriteria tim pemeriksa kesehatan;
 - c. tahapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan; dan
 - d. penilaian Kesehatan
 3. terhadap Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 memperhatikan UndangUndang Pemilihan, PKPU 8/2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Berdasarkan angka 1 dan 2, kami mengimbau Peserta Pemilihan/Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan memperhatikan Tahapan Pencalonan sub tahapan pengumuman pendaftaran pasangan, pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon, penetapan pasangan dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan, PKPU

8/2024, dan KPT 1090/2024, serta ketentuan dalam persyuratan lainnya;

3. Peserta Pemilihan/Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan memperhatikan jadwal pelaksanaan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sesuai dengan Lampiran I Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diatur pada PKPU 8/2024;
4. Peserta Pemilihan/Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan melakukan langkahlangkah antisipasi terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
5. Peserta Pemilihan/Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan melakukan konsultasi aktif pada helpdesk KPU Provinsi Jawa Timur apabila terdapat halhal yang berkaitan dengan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik, Persyaratan Calon, Dokumen Persyaratan Calon, Pendaftaran calon dan ataupun hal lainnya yang dirasa perlu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengimbau Peserta Pemilihan/Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan melaksanakan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SAADIT/A PRADANA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip